



BELAJAR SEJARAH DI MUSEUM PETA BOGOR

Pemandu museum menjelaskan tentang diorama kepada sejumlah siswa SD di Museum dan Monumen Pembela Tanah Air (PETA), Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/2). Kunjungan tersebut merupakan kegiatan belajar di luar kelas yang bertujuan menambah wawasan kebangsaan dan pengetahuan tentang sejarah perjuangan PETA dalam kemerdekaan Republik Indonesia.

TAHUN LALU PENDAPATAN TAK CAPAI TARGET

Retribusi Tahun Ini di Banten Ditarget Naik 6 Kali Lipat

Walau target pada APBD TA 2022 tak tercapai, tetapi Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, M Faizal, optimistis pendapatan retribusi tahun ini akan meningkat karena ada beberapa potensi yang belum tergal. Misalnya saja, retribusi pemanfaatan jalan, dan sewa tempat gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.

SERANG (IM)- Tahun ini, retribusi daerah Provinsi Banten ditarget naik enam kali lipat dibandingkan tahun lalu. Padahal pada APBD Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2022, target sebesar Rp20 miliar tak tercapai.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, M Faizal mengatakan, tahun lalu, capaian retribusi daerah hanya sekira Rp19 miliar dari target Rp20 miliar.

"Tahun ini ditarget Rp120 miliar untuk retribusi daerah,"

ungkap Faizal, Senin (13/2). Faizal mengaku, pekan lalu pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. Salah satu agendanya adalah mengevaluasi pendapatan pada TA 2022.

ia menekankan pendapatan daerah dari sektor retribusi. "Kita akan secara intensif melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan retribusi. Salah satunya membentuk

Satgas Retribusi Daerah. Isin-

nya Bapenda, OPD penghasil retribusi daerah, serta Satpol PP," ujarnya.

Walau pun target pada APBD TA 2022 tak tercapai, tetapi ia optimistis bahwa pendapatan retribusi tahun ini akan meningkat karena ada beberapa potensi yang belum tergal. Misalnya saja, retribusi pemanfaatan jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dan sewa tempat gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.

Dengan dua potensi itu, politikus Partai Golkar ini optimistis bahwa target itu bisa tercapai. Namun, ia menekankan Pemprov harus memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana kepada masyarakat sebelum memungut retribusi.

Sementara untuk pajak daerah, Faizal mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, capaian pajak daerah TA 2022 yakni 98,03 persen atau nilainya Rp8,203 triliun.

"Kenapa kurang dua persen. Faktornya adalah tahun lalu kurangnya BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor-red) kendaraan baru karena pengaruh Covid-19 dan alat langka, karena microchipnya langka, sehingga unitnya datang terlambat," ungkap Faizal.

Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan, di tahun 2023 ini, target pendapatan daerah meningkat menjadi Rp11,547 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD Rp8,544 triliun, dana transfer Rp2,989 triliun, serta pendapatan lain-lain daerah Rp13,845 miliar. Dari target PAD Rp8,544 triliun, sebanyak Rp7,944 triliunnya adalah pajak daerah. Per 7 Februari 2023 lalu, pajak daerah sudah masuk 9,36 persen.

Terpisah, Plt Kepala Bidang Pengendalian Sistem Informasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Provinsi Banten, Ahmad Budiman mengatakan, pihaknya sedang memetakan

sumber-sumber pendapatan dari retribusi daerah. "Nanti kita coba, jalan provinsi kita coba optimalkan penerimaan retribusinya dan pemanfaatan bahu jalan juga nanti lebih terfokus ke sana. Hampir Rp90 miliar," ujarnya.

Untuk sewa tempat gedung Badan Diklat, Budi mengatakan, bakal menyewakan kepada pemerintah kabupaten/kota atau instansi pemerintah di luar Provinsi Banten.

"Dengan beberapa jenis Diklat yang sudah terakreditasi siapa tahu bisa memfasilitasi diklat-diklat untuk meningkatkan sumber daya aparatur sipil negara. Khususnya di luar wilayah Provinsi Banten. Kalau dari Provinsi Banten tidak bayar," terangnya.

Kata dia, jenis retribusi daerah tahun ini dengan tahun lalu sama. Hanya saja tahun ini lebih dioptimalkan.

Ia mengaku bakal membentuk Satgas untuk area-area tertentu yang memang bisa secara langsung menghasilkan retribusi daerah. ● **pra**

Wanita Paruh Baya di Pidie Meninggal Diamuk Gajah

BANDA ACEH (IM) - Seorang wanita paruh baya meninggal dunia akibat amukan gajah liar di Gampong Lhok Keutapang, Dusun Genie, Kecamatan Tange, Kabupaten Pidie, dengan kondisi kepala terpisah dari badan.

Keuchik Gampong Lhok Keutapang, Mustafa, Senin (13/2) mengatakan korban

bernama Fitriani (45) yang merupakan warga setempat ditemukan meninggal dunia pada Minggu (12/2) pukul 22.30 WIB setelah dilakukan pencarian oleh warga.

Ia mengatakan korban bersama suaminya Usman Abu Bakar atau Tengku Sabang menuju ke kebun pada Sabtu (11/2) namun suaminya melanjutkan perjalanan ke Geumpang

dan meninggalkan istri sendiri di kebun. "Sebelumnya suami mengamankan jika dirinya tidak pulang hingga sore hari, ia menyuruh istri tersebut untuk turun ke perkampungan saja," kata Mustafa.

Selang sehari Tengku Sabang kembali naik ke kebun pada pukul 18.00 WIB menuju ke tempat semula mereka

tempat yang jarak perjalanan setapak sekitar tiga kilometer dari perkampungan warga.

Sesampai di lokasi, Tengku Sabang melihat gubuk yang mereka temui sudah porak poranda dan istrinya tidak ada di tempat. "Suami korban melaporkan ke gampong sehingga kami bersama warga menuju ke kebun dan ikut mencari korban

dan sekitar pukul 22.30 WIB kami menemukan korban sudah meninggal dunia dengan kondisi telungkup dan kepala terpisah dari badan," katanya.

Ia mengatakan korban telah diserahkan kepada keluarganya di Gampong Paru, Kabupaten Pidie Jaya dan mereka tidak berkenan untuk diotopsi. ● **pra**

Bapenda Kota Tangerang Target PAD Tahun 2023 Rp1,2 Triliun

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, melalui Badan Pendapatan Daerah menargetkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp1,2 triliun berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa di Tangerang, Senin (13/2), mengatakan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 sebesar Rp550 miliar serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yakni Rp175 miliar.

Ia menuturkan, untuk memenuhi target capaian pendapatan maka Bapenda Kota Tangerang menggelar Pekan Panutan Pajak 2023 mulai tanggal 13 - 17 Februari 2023 Pekan Panutan Pajak merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi kewajibn warga negara agar memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak kepada negara. "Terlebih para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelopor dan panutan masyarakat dalam hal membayar pajak," kata dia.

Pakan panutan pajak di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang akan dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Februari 2023 dengan sasaran ASN dan di 13 kecamatan tanggal

13 - 17 Februari dengan target sasaran masyarakat umum.

"Dengan ini, Pemkot Tangerang melalui Bapenda lewat Pekan Panutan Pajak 2023 ini bisa mengajak seluruh PNS maupun pegawai Pemkot Tangerang lainnya untuk menjadi contoh wajib pajak yang taat, dengan pembayaran pajak di awal," kata Kiki usai pekan panutan pajak di Pemkot Tangerang.

Ia menambahkan, pembayaran pajak akan meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. "Jadi ayo, menjadi wajib pajak yang patuh bayar pajak di awal, dengan turut serta pada Pekan Panutan Pajak 2023, atau memanfaatkan Mobil Pajak Keliling kelurahan, loket pembayaran 13 kecamatan atau pembayaran online," ajak Kiki.

Sebagai informasi, Bapenda tengah memberikan program diskon hingga 31 Maret mendatang seperti diskon SPPT-PBB-P2 sebesar 70 persen sampai dengan tahun 2014. Penghapusan sanksi administratif SPPT PBB-P2 sampai dengan tahun 2022, pengurangan SPPT PBB-P2 tahun 2023 sebesar Buku II pengurangan 10 persen, Buku III pengurangan enam persen, Buku IV pengurangan empat persen dan Buku V pengurangan tiga persen. ● **pp**

Aini Suci Wismansyah Dikukuhkan Sebagai Bunda Literasi Kota Tangerang

TANGERANG (IM)- Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah disaksikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Aini Suci Wismansyah sebagai Bunda Literasi Kota Tangerang, Senin (13/2).

Wali Kota Arief berpesan agar Bunda Literasi terlantik menjadi sosok panutan dan motor penggerak di masyarakat dalam pembudayaan kegemaran membaca.

"Kami harapkan sosok Bunda Literasi mampu menjadikan masyarakat Tangerang cerdas dan berbudaya," pesan Wali Kota Arief.

Di ulang tahun yang ke-30, pemerintah Tangerang terus mendorong partisipasi masyarakat untuk gemar membaca.

"Dengan gemar membaca, mudah-mudahan masyarakat semakin memahami semakin berpengetahuan sehingga menjadi bangsa yang cerdas pula," tambah Arief.

Melalui kegiatan Festival Literasi 2023 Kota Tangerang, Wali Kota Arief berharap Tangerang menjadi kota yang maju, yang mampu bersaing di tengah perubahan yang cepat.

"Kita harus meningkatkan kualitas pengetahuan

dan bacalah bacaan yang memberikan manfaat. Jangan terburu-buru dan korban jiwa dampaknya bagi masyarakat yang beradab," ujar Wali Kota.

Senada dengan yang disampaikan Wali Kota, Kepala Perpustakaan, Muhammad Syarif Bando setuju agar anak-anak sebagai generasi penerus pembangunan tidak disesaki dengan aneka tayan-gan yang menghambat proses mencerdaskan anak bangsa.

"Kita harus pastikan anak-anak Indonesia dikalahkan oleh pengaruh media sosial," pungkas Kepala Perpustakaan itu. ● **bam**



Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Aini Suci Wismansyah sebagai Bunda Literasi Kota Tangerang, Senin (13/2).

Pemkot Tangsel Siapkan Beasiswa 5.000 Anak di Sekolah Swasta

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten menyiapkan beasiswa untuk pelajar sekolah swasta pada tahun 2023 yakni sebanyak 5.000 kuota, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2.500 orang.

"Tahun lalu, beasiswa sekolah swasta menyasar 2.500 anak dan di tahun ini mengalami peningkatan menjadi 5.000 anak," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan di Tangerang, kemarin.

Tak hanya itu saja, Wakil Wali Kota Pilar menjelaskan jika Pemkot Tangsel juga mempunyai program beasiswa SMP swasta. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir para siswa yang tidak lolos karena zonasi.

"Jadi yang penting ini, anak-anak bisa sekolah. Jadi ini di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan," ujarnya.

Dijelaskannya pendidikan ini menjadi satu tonggak penting dalam kemajuan suatu kota. Dengan begitu Pemkot Tangsel akan berupaya menyusun program untuk terus meningkatkan layanan pendidikan.

"Siswa tidak usah khawatir, nanti bisa komunikasi dengan sekolah. Apalagi sekarang ada zonasi yang mau masuk SMP swasta silakan tanya ke Disdik mana sekolah yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota dengan memberikan beasiswa sekolah dan nanti juga untuk yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi ada beasiswa untuk penghafal Al Quran," kata dia.

Harapannya adalah se-

luruh program dan layanan pendidikan dapat berjalan baik dan tepat sasaran sehingga akan terus dapat memajukan pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Wakil Wali Kota Pilar menjelaskan Pemkot Tangsel berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya agar kualitas dan layanan pendidikan dapat dirasakan seluruh warga Tangerang Selatan. Dan pemerintah dapat mencetak banyak SDM Tangsel yang berprestasi dan unggul.

"Kami berupaya agar anak-anak kita semua ter-cover program tidak ada satu kekurangan karena pendidikan. Ini menjadi sektor utama program Tangsel kami berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan dan layanan pendidikan," ujar Wakil Wali Kota Pilar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni menjelaskan bantuan biaya pendidikan diberikan terhadap siswa yang tergolong dalam keluarga tidak mampu.

Penerima bantuan ini adalah di luar dari penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Jadi tidak double, tahun kemarin sebanyak 1.039 siswa SD yang dapat bantuan, dan berlanjut untuk tahun ini," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa program serupa akan terus berlanjut secara berjenjang mulai dari SD, lalu bantuan untuk siswa SMP yang juga sudah diberikan ke 2500 siswa dan PKBM sebanyak 59.

"Jadi total bantuan yang sudah diberikan sebanyak 3.598 pelajar," katanya. ● **pp**



OPERASI PASAR BERAS MURAH

Warga antre membeli beras saat operasi pasar beras murah di halaman Kantor Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (13/2).

Pemprov Banten Diminta Tingkatkan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan

SERANG (IM)- Pemprov Banten diminta untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebencanaan. Hal itu disampaikan Kasubdit Tanggap Darurat dan Pasca-Bencana Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Pramudya Ananta Boga dalam acara forum

OPD penyusunan rencana kerja BPBD Banten tahun anggaran 2024 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.

Katanya, SPM Kebencanaan sudah menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh pemda. Sebab, SPM merupakan layanan informasi dalam menangani setiap adanya kejadian kebencanaan. "SPM ini diberikan kepada warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana maupun korban bencana. Guna mencegah dan meminimalisir dampak kerusakan maupun korban jiwa dampak bencana," kata Pramudya, Senin (13/2).

Pramudya mengatakan, guna meminimalisir kerusakan dan korban jiwa dampak bencana alam, maka perlu dilakukan mitigasi bencana dengan cara melakukan edukasi semaksimal mungkin kepada masyarakat di daerah rawan bencana.

"Ada beberapa faktor-faktor yang perlu dilakukan supaya pada saat terjadi bencana ini korban dapat diminimalisir. Oleh karenanya maka masyarakat perlu di edukasi, perlu dilatih, perlu diberikan disiapkan satpansnya sehingga korban seminimal mungkin dapat diberikan pelayanan," katanya.

Dengan segala keterba-

tan seperti anggaran dan juga sumber daya manusia (SDM), Pramudya tidak memungkirki jika pemenuhan SPM kebencanaan sulit dilakukan secara penuh.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemprov maupun pemda untuk memenuhi SPM Kebencanaan berbasis rencana kerja tahunan.

"Kita bayangkan kalau masyarakat di wilayah rawan banjir itu ada sekian 17.000 orang tentu akan kesulitan karena beban keterbatasan anggaran, sarana prasarana, SDM dan seterusnya. Oleh karenanya maka pendekatan SPM ini berbasis rencana kerja tahunan, jadi kita harus membagi capaian SPM ini setiap tahunnya," katanya.

Sebelum menyusun rencana SPM, Pemprov dan Pemda harus terlebih dahulu menentukan bencana prioritas. Pemda di wilayahnya melalui BPBD harus dapat memetakan berdasarkan kajian risiko bencana.

"Jadi mereka yang pertama harus punya kajian risiko bencana, yang kedua menentukan bencana prioritas yang harus di tangani. Apakah tsunami? Apakah bencana di Gunung Krakatau. Nah harus punya bencana prioritas yang akan ditangani di setiap tahun anggaran sebagai bentuk persiapan ketangguhan beserta daerah masyarakat bila mana bencana terjadi," ucapnya.

Ia berharap, Pemprov Banten bisa membina dan melakukan pengawasan secara optimal khususnya kepada BPBD kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM ini. "Khusus kabupaten kota, yang pertama kepada kota ini harus memiliki kajian risiko bencana itu," pungkasnya. ● **pra**